

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Kecamatan Lubuk Basung adalah merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kabupaten Agam dengan Ibu Kota Kecamatan Manggopoh yang letaknya membujur dari Barat ke Timur . Kecamatan Lubuk Basung ini memiliki 5 nagari. Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung adalah Nagari Lubuk Basung, Nagari Geragahan, Nagari Kampung Pinang, Nagari Kampung Tengah, dan Nagari Manggopoh.

Nagari Manggopoh merupakan salah satu dari 5 nagari yang paling luas yang ada di Kecamatan Lubuk Basung. Luas Nagari Manggopoh adalah 11.820 Ha dengan ketinggian 102 M dari permukaan laut dan suhu udara rata-rata 20 °C. Bentuk permukaan lahan pada umumnya daratan dan sebagian berbukit dan bergelombang dengan iklim tropis dan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 3.750 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan September s/d Januari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni s/d Agustus. Kondisi ini sangat mempengaruhi keadaan usaha masyarakat yang sebagian besar adalah petani.

Secara administratif, Nagari Manggopoh memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan IV Nagari Bawan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Tiku Utara.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kampung Tengah.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara.

Wilayah Nagari Manggopoh sebagian besar adalah lahan pertanian yang terdiri dari lahan persawahan seluas 3.250 Ha dan perkebunan berupa sawit seluas 2.090 Ha, kebun kelapa 1.387 Ha, kebun campuran 1.900 Ha, tegalan/ ladang 328 Ha dan cengkeh 414 Ha, sisanya berupa pemukiman penduduk, hutan belukar, semak, tembagan, rawa dan lain-lain seluas 2.316 Ha. Adapun kondisi penggunaan tanah di Nagari Manggopoh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 4.1**  
**LUAS PENGGUNAAN TANAH DI NAGARI MANGGOPOH TAHUN 2008**

NO.	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS ( Ha )	%
1.	Perkampungan	81	0,69
2.	Sawah	3.250	27,81
3.	Tegalan/ Ladang	328	2,80
4.	Kebun Campuran	1.900	16,26
5.	Perkebunan Rakyat ( Kelapa )	1.387	11,86
6.	Perkebunan Kelapa Sawit	2.090	17,88
7.	Semak/ Alang-Alang	181	1,54
8.	Hutan Belukar	1.900	16,26
9.	Cengkeh	414	3,54
10.	Tebangan/ LC	82	0,70
11.	Rawa-Rawa	19	0,16
12.	Lain-Lain	53	0,45
Jumlah		11.685	100

Sumber : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Nagari Manggopoh menggantungkan hidupnya dengan bertani dan berkebun. Oleh karena itu, potensi nagari tersebut hendaknya mendapat perhatian yang lebih dari pihak Pemerintahan Nagari Manggopoh untuk dikembangkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat Nagari Manggopoh. Pengelolaan potensi nagari yang baik akan memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, karena pemerintahan nagari adalah fasilitator untuk mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat nagari khususnya masyarakat Nagari Manggopoh.

Nagari Manggopoh memiliki 8 Jorong yaitu Jorong Balai Satu, Jorong Batu Hampar, Jorong Pasar Durian, Jorong Anak Air Dadok, Jorong Kubu Anau, Jorong Sago, Jorong Padang Tongga dan Jorong Manggopoh Utara. Luas masing-masing jorong dapat diperhatikan pada tabel 4.2 berikut ini :

**TABEL 4.2**  
**LUAS WILAYAH NAGARI MANGGOPOH MENURUT JORONG**  
**TAHUN 2008**

No.	Jorong ( nama )	Luas ( Ha )
1.	Balai Satu	215
2.	Batu Hampar	3.315
3.	Pasar Durian	1.474
4.	Anak Air Dadok	853
5.	Kubu Anau	731
6.	Sago	301
7.	Padang Tongga	2.005
8.	Manggopoh Utara	2.926
<b>Jumlah</b>		<b>11.820</b>

*Sumber:* Profil Nagari Manggopoh, 2008

Jorong yang memiliki wilayah terluas adalah jorong Batu Hampar dengan luas wilayah sebesar 3.315 Ha dari luas keseluruhan Nagari Manggopoh. Sedangkan wilayah tersempit berada di jorong Sago dengan luas wilayah 301 Ha dari luas keseluruhan wilayah Nagari Manggopoh.

Selain itu, jarak dari jorong ke ibu kota Kecamatan akan mempengaruhi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan di lapangan dan kunjungan ke jorong-jorong tersebut. Nama-nama jorong beserta jarak ke ibu kota Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

**TABEL 4.3**  
**JARAK KANTOR NAGARI/ JORONG KE IBU KOTA KECAMATAN, IBU**  
**KOTA KABUPATEN DAN IBU KOTA PROPINSI TAHUN 2008**

No	Nagari/ Jorong	Ibu Kota Kecamatan ( Km )	Ibu Kota Kabupaten ( Km )	Ibu Kota Propinsi ( Km )
1.	<b>Manggopoh</b>	<b>0,3</b>	<b>9</b>	<b>105</b>
	Balai Satu	0,5	9,5	105
2.	Batu Hampar	1,5	7,5	106,5
3.	Pasar Durian	2	11	103
4.	Anak Air Dadok	5	14	100
5.	Kubu Anau	16	25	114
6.	Sago	7	12	106,5
7.	Padang Tongga	7.5	13	111,5
8.	Manggopoh Utara	12	15	116,5

*Sumber:* Profil Nagari Manggopoh, 2008

#### **4.1.2 Kondisi Demografi**

Penduduk merupakan faktor penting dan modal dasar pembangunan yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual. Karena penduduk merupakan salah satu modal dasar dari aktivitas pembangunan. Dengan peran serta penduduk, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain itu apabila penduduk tersebut diarahkan atau dibina sebagai tenaga kerja yang efektif maka hal ini merupakan potensi yang sangat besar nilainya. Sebaliknya apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka peningkatan kesejahteraan

penduduk tersebut tidak merata yang pada akhirnya hal ini akan mengganggu stabilitas nasional.

Jumlah penduduk di Nagari Manggopoh berdasarkan data yang diperoleh tahun 2008 adalah 15.961 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Manggopoh dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

**TABEL 4.4**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN NAGARI/ JORONG**  
**TAHUN 2008**

No.	Nagari/ Jorong	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	<b>Manggopoh</b>	<b>8.007</b>	<b>7.954</b>	<b>15.961</b>
1.	Balai Satu	681	728	1.409
2.	Batu Hampar	1.424	1.487	2.911
3.	Sago	1.332	1.337	2.669
4.	Pasar Durian	824	895	1.719
5.	Kubu Anau	700	676	1.376
6.	Padang Tongga	823	814	1.637
7.	Anak Air Dadok	779	702	1.481
8.	Manggopoh Utara	1.444	1.315	2.759

*Sumber:* Profil Nagari Manggopoh, 2008

Secara keseluruhan dari table 4.4 di atas, penduduk laki-laki di Nagari Manggopoh masih lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 8.007 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 7.954 jiwa. Selanjutnya data keadaan penduduk Nagari Manggopoh menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

**TABEL 4.5**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DI NAGARI**  
**MANGGOPOH TAHUN 2008**

No	Kelompok Umur (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	0-4	1.770
2	5-9	2.158
3	10-14	2.452
4	15-19	1.474
5	20-24	773
6	25-29	814
7	30-34	889
8	35-39	1277
9	40-44	871
10	45-49	784
11	50-54	753
12	55-59	542
13	60-64	525
14	65+	867
<b>Jumlah</b>		<b>15.961</b>

*Sumber:* Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian besar penduduk Nagari Manggopoh termasuk dalam kategori usia muda atau bisa juga dikatakan sebagai usia produktif. Hal demikian merupakan salah satu faktor yang sangat berharga dalam menggali potensi yang ada pada masyarakat nagari, artinya sumber daya manusia yang tersedia di Nagari Manggopoh sangat memungkinkan dalam menjalankan pembangunan nagari ke arah yang lebih maju nantinya.

#### **4.1.3. Kondisi Ekonomi**

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama pemerintah baik pusat maupun daerah terutama yang berbasis di masyarakat bawah adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi masyarakat Nagari

Manggopoh selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan sekunder misalnya pendidikan formal dan informal, sarana transportasi, sarana hiburan, dan kebutuhan tersier.

Dalam hal ini, Pemerintahan Nagari Manggopoh harus menjalankan fungsinya dengan baik karena segala persoalan yang terjadi apalagi menyangkut masalah kehidupan masyarakat secara keseluruhan hendaknya menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dibanding dengan persoalan-persoalan lain yang ada di nagari. Peran aktif Pemerintahan Nagari Manggopoh dalam menyelesaikan masalah yang ada di nagari adalah wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintahan nagari itu sendiri.

Namun demikian sektor lain juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dari segi lapangan kerja yang mereka geluti dan dilakukan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 4.6**  
**JENIS MATA PENCAHARIAN PENDUDUK TAHUN 2008**

No	Jenis Mata pencaharian	Jumlah(jiwa)	Persentase (%)
1.	Petani	4.682	29
2.	Pegawai Negeri Sipil	1.154	7
3.	Sektor Jasa/Perdagangan	2.689	17
4.	Industri Kecil	137	1
5.	Pertambangan Galian C	174	1
6.	Perkebunan	3.783	24
7.	Lain-lain	3.342	21
Jumlah		15.961	100

Sumber : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dari table diatas menunjukkan mayoritas dari penduduk Nagari Manggopoh berprofesi sebagai petani dan pekebun. Adapun ke dua profesi tersebut terbagi atas 2 jenis yaitu petani/ pekebun yang memiliki lahan sendiri dan petani/ pekebun penggarap yang tidak memiliki lahan pertanian/ perkebunan.

#### **4.1.4 Keadaan Sosial Budaya**

Hal-hal yang termasuk dalam sosial budaya meliputi antara lain yaitu bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini adalah agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Manggopoh, tingkat pendidikan yang dienyam serta keadaan kebudayaan masyarakat tersebut.

##### **4.1.4.1 Agama**

Dalam kehidupan beragama, masyarakat Nagari Manggopoh secara keseluruhan atau 100% adalah memeluk agama Islam. Data ini sesuai dengan yang ada pada data dasar profil nagari tahun 2008. Sehingga masyarakat nagari dalam menjalankan kehidupan sehari-hari secara tidak langsung dipengaruhi agama yang telah dianutnya.

Untuk melaksanakan kegiatan ibadah bagi masyarakat Nagari Manggopoh telah tersedia sarana peribadatan dengan jumlah selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut :

**TABEL 4.7**  
**JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI NAGARI MANGGOPOH**  
**TAHUN 2008**

No.	Jenis Prasarana	Jumlah (unit)
1	Masjid	32
2	Surau	32
3	Mushalla	14

*Sumber* : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dalam mendukung kelancaran kehidupan beribadah, di Nagari Manggopoh memiliki 32 masjid, 32 surau dan 14 mushalla. Dan di tiap-tiap mesjid terdapat TPA ( Taman Pendidikan Al-Qur'an ) yang berfungsi untuk mengajarkan pengetahuan agama bagi generasi mudanya, dan sampai saat ini TPA tersebut aktif dalam penyelenggaraannya setiap minggu. Dan yang tidak kalah pentingnya pada tiap-tiap minggu ada suatu kelompok pengajian yang khusus untuk remaja, jadi dengan sarana inilah diharapkan pendidikan moral yang baik bagi generasi mudanya sebagai generasi penerus nantinya.

#### **4.1.4.2 Pendidikan**

Pendidikan sangat penting dalam menciptakan suatu sumber daya manusia yang berpotensi dalam pembangunan. Untuk mendukung hal pendidikan yang baik, maka Pemerintahan Nagari Manggopoh benar-benar memberi perhatian yang besar terhadap proses pendidikan masyarakat dengan terus mengupayakan berbagai fasilitas pendidikan, baik sarana dan prasarananya dengan mengupayakan bekerjasama

dengan berbagai pihak. Kita menyadari bahwasanya tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat nagari sejalan dengan tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri. Dan dilihat dari segi tingkat ekonomi masyarakat Nagari Manggopoh tergolong sebagai tingkat ekonomi menengah dan sebagian besar adalah masyarakat yang ekonominya tergolong sedang.

Sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Nagari Manggopoh sudah didukung oleh tenaga pengajar yang memadai dan cukup berpengalaman, walaupun sebenarnya tenaga pengajar yang ada dapat dikatakan masih kurang dari yang seharusnya diperlukan. Adapun sarana pendidikan yang ada antara lain dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut :

**TABEL 4.8**  
**JENIS PRASARANA PENDIDIKAN DI NAGARI MANGGOPOH**  
**TAHUN 2008**

No.	Prasarana Pendidikan	Jumlah (unit)
1	Taman Kanak-kanak	3
2	Sekolah Dasar (SD)	22
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	1

*Sumber* : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Di sisi lain, jika ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan yang pernah dienyam masyarakat Nagari Manggopoh, maka dapat dikategorikan bahwa pendidikan masyarakat Nagari Manggopoh masih rendah sebagaimana tertera dalam tabel 4.9 di bawah ini :

**TABEL 4.9**  
**KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN**  
**2008**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Buta Aksara dan Angka	-
2.	Tidak Tamat SD	1.455
3.	Tamat SD	4.863
4.	Tamat SLTP	3.480
5.	Tamat SLTA	2.595
6.	Tamat Akademi ( D1-D3 )	1.473
7.	Sarjana ( S1 )	325
Jumlah		14.191

*Sumber* : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dari data yang diperoleh diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang pernah dienyam oleh masyarakat Nagari Manggopoh relatif sedang, sebagian besar masyarakatnya tamat Sekolah Dasar.

#### **4.1.4.3 Kesehatan**

Untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, maka kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk itu harus diawali dengan kesadaran dari masing-masing individu masyarakat.

Masyarakat Nagari Manggopoh cukup mengerti akan arti penting kesehatan, hal ini didukung oleh sarana prasarana yang cukup memadai. Mengenai jumlah sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Manggopoh dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini :

**TABEL 4.10**  
**PRASARANA PENUNJANG KESEHATAN DI NAGARI MANGGOPOH**  
**TAHUN 2008**

No.	Prasarana	Jumlah (unit)
1	RS	2
2	Puskesmas Pembantu	4
3	Posyandu	25

Sumber : Profil Nagari Manggopoh, 2008

#### 4.1.5 Kebudayaan

Kebudayaan masyarakat Nagari Manggopoh secara umum dipengaruhi oleh dua unsure yaitu unsur agama Islam dan unsur adat Minangkabau. Dari kedua unsur ini terjadi perpaduan sehingga terjadi Kebudayaan Minangkabau yang bercorak atau bernilai keagamaan yang mengandung nilai-nilai Islami. Hal ini dapat terlihat dari filosofis Minangkabau yaitu *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* ( adat berdasarkan kepada agama, agama berdasarkan pada kitabullah ).

Disisi lain animo masyarakat Nagari Manggopoh khusus para pemudanya lebih tertarik kepada budaya yang baru. Sayangnya, budaya yang diikuti para generasi muda tersebut adalah budaya yang menyimpang dari ajaran agama dan adat istiadat yang ada. Sehingga yang terjadi adalah degradasi atau kemerosotan nilai dan moral yang ada pada generasi mudanya. Dan hal inilah yang sangat di sayangkan oleh generasi-generasi tua di nagari tersebut.

Saat ini pemerintah nagari dan pemuka masyarakat gencar-gencarnya menghimbau dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki

keadaan yang sedang berlaku, agar nilai-nilai agama dan budaya yang baik yang sudah ada tidak dikalahkan dan dihancurkan oleh budaya-budaya barat yang merusak generasi muda. Untuk itu pemerintah nagari dan pemuka masyarakat menggalakkan dan mengadakan kelompok-kelompok kesenian yang melestarikan budaya-budaya Minangkabau seperti Randai, Silat Tradisional, Tambua, Tari Piring, dan Saluang.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Kondisi Umum Pemerintahan Nagari Manggopoh**

#### **4.2.1.1 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari beserta perangkatnya dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai unsur Legislatif Nagari.

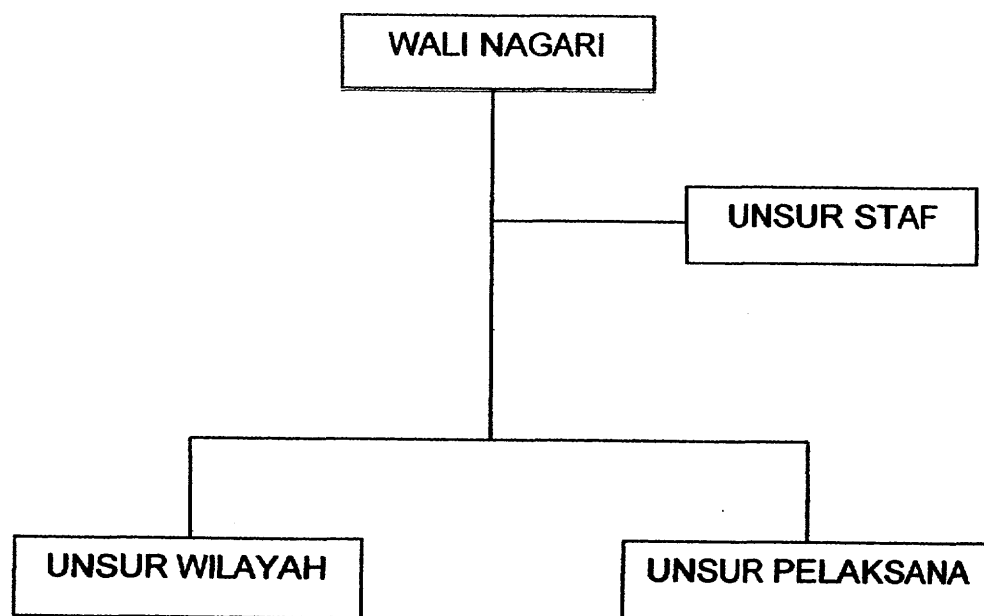
Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh, tergambar bahwa kondisi pemerintahan Nagari Manggopoh sudah sangat baik, yakni artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu terdiri dari unsur Pimpinan atau Wali Nagari, Sekretaris Nagari dengan Unsur Stafnya, dan Unsur Wilayah dan Unsur Pelaksana. Perangkat Nagari Manggopoh terdiri atas :

- a. Unsur Staf ; unsur pelayanan seperti Sekretaris Nagari atau perangkat tata usaha.

- b. Unsur Pelaksana ; pelaksana teknis lapangan seperti Urusan Pemerintahan, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dan Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- c. Unsur Wilayah ; unsur pembantu Wali Nagari di wilayah, yaitu kepala-kepala jorong. Jumlah dan sebutan perangkat nagari tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Sebagaimana yang dapat digambarkan sebagai berikut :

**GAMBAR 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI NAGARI**



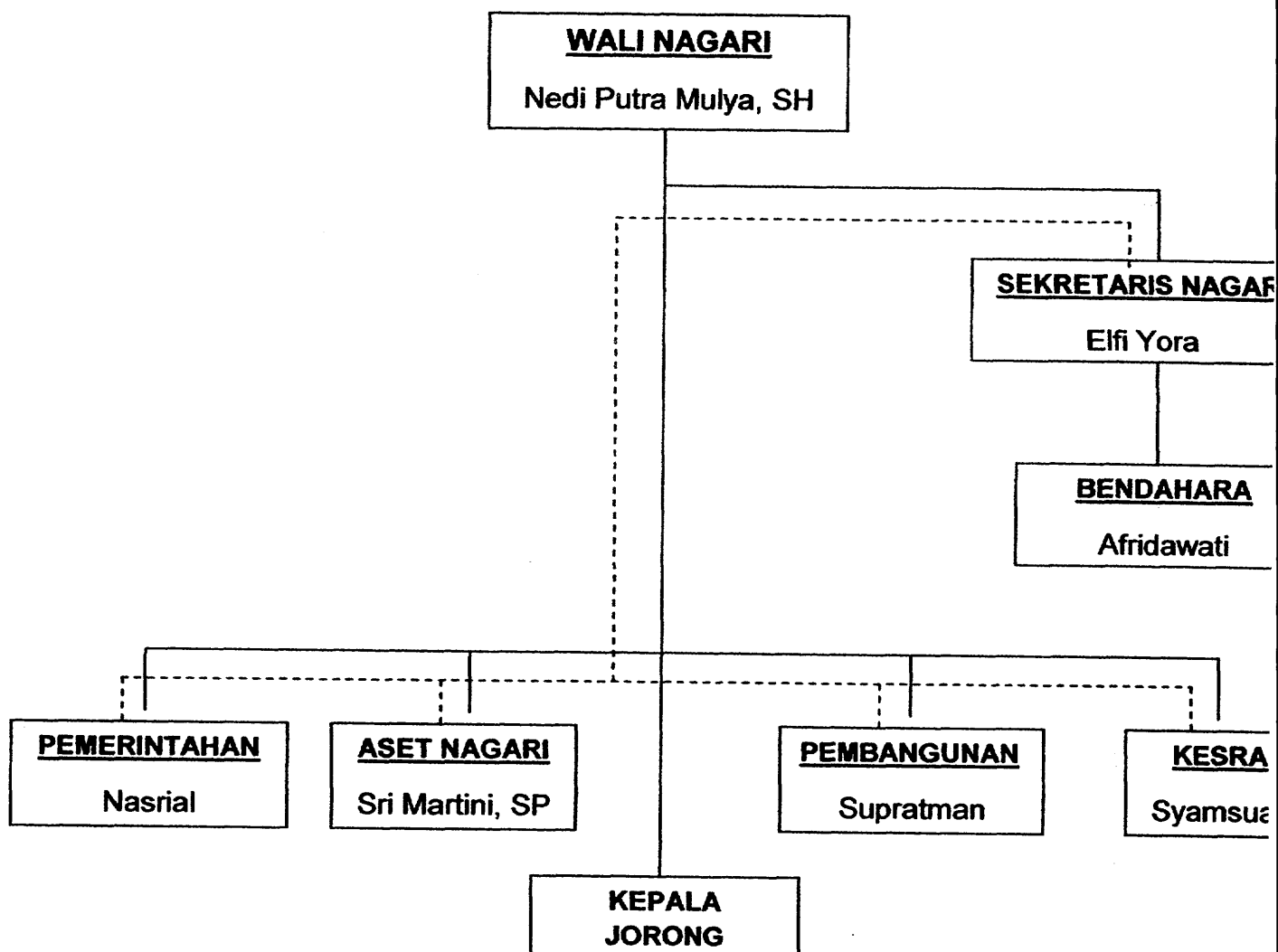
Dari tugas pokok dan fungsi masing-masing telah dijabarkan langsung baik didalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri dan bahkan di tingkat daerah yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Gambaran umum Nagari Manggopoh mengenai Struktur Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut :

- Wali Nagari
- Sekretaris Nagari
- Bendaharawan Nagari
- Kepala Urusan Pemerintahan
- Kepala Urusan Aset Nagari
- Kepala Urusan Pembangunan
- Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
- Dan 8 (delapan) orang Kepala Jorong yang disesuaikan dengan jumlah jorong yang ada di nagari tersebut.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan dari Pemerintah Nagari Manggopoh adalah sebanyak 15 (lima belas) orang yang bertugas melayani dan memfasilitasi seluruh kegiatan pemerintahan yang ada di Nagari Manggopoh. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi umum Pemerintah Nagari Manggopoh, penulis akan menampilkan susunan organisasi Pemerintah Nagari Manggopoh berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 :

**GAMBAR 4.2**  
**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI MANGGOPOH**  
**PERDA NOMOR 12 TANGGAL 10 DESEMBER 2007**



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando

Sumber : Kantor Wali Nagari Lubuk Basung

#### **4.2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Nagari Manggopoh**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Wali Nagari dan Perangkat Nagari memerlukan dukungan dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Berikut akan penulis uraikan tugas dan wewenang Wali Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007.

##### **- Wali Nagari**

Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wali Nagari mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- b. Membina kehidupan masyarakat nagari.
- c. Membina perekonomian nagari.
- d. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif.
- e. Mendukung kelangsungan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

Beban tugas seorang Wali Nagari sangatlah kompleks dan bukanlah semata-mata menjadi beban untuk Wali Nagari, akan tetapi juga menjadi beban Perangkat Nagari sebagai unsur yang membantu Wali Nagari dalam menjalankan dan menyelenggarakan Pemerintahan Nagari.

##### **- Sekretaris Nagari**

Tugas Sekretaris Nagari adalah membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Fungsi Sekretaris Nagari adalah :

- a. Perumusan rencana program-program dan tugas-tugas umum pemerintahan nagari.
- b. Pengkoordinasian dan pengelolaan data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan tugas-tugas nagari.
- c. Pemberian pelayanan administratif kepada seluruh perangkat nagari.
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan.
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

- **Bendahara Nagari**

Bendahara mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan nagari, menerima, mengeluarkan, menghimpun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. Bendahara mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan nagari.
- b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan nagari.
- d. Menerima, memeriksa dan mencatat Surat Pertanggungjawaban keuangan.
- e. Menandatangani kwitansi pembayaran uang.
- f. Penyusunan rencana penggunaan uang.

g. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan nagari.

- **Kepala Urusan Pemerintahan**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program pembinaan wilayah, keamanan dan ketertiban, menyelesaikan sengketa perdata yang menjadi wewenangnya, melaksanakan administrasi kependudukan, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesatuan bangsa dan politik. Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan antara lain:

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembinaan kerukunan antar warga.
- c. Pengumpulan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak/ retribusi.
- e. Pelaksanaan administrasi kependudukan.

- **Kepala Urusan Pembangunan**

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun program kerja, mengolah data bidang pembangunan, meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, mengadministrasikan bantuan pembangunan yang masuk di nagari, menyiapkan bahan dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan nagari. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pendataan sarana dan prasarana serta potensi pembangunan nagari.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan nagari.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong.
- d. Pendataan terhadap jumlah dan jenis bantuan yang ada di nagari.
- e. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan nagari.

- **Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan**

Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Wali Nagari dibidang kemasyarakatan, melaksanakan kegiatan pendataan sarana dan prasarana peribadatan, melaksanakan penyaluran bantuan korban bencana, melaksanakan pendataan terhadap jumlah dan jenis penyandang masalah social, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan masalah kesehatan, serta melestarikan nilai-nilai agama dan adat yang telah membudaya ditengah-tengah masyarakat. Fungsi Kepala Urusan Sosial Kemasyarakatan :

- a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.

- b. Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial.
- c. Pembina terhadap organisasi keagamaan.
- d. Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan.
- e. Monitoring dan pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat.

**- Kepala Urusan Keuangan dan Aset**

Kepala Urusan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengolahan keuangan nagari, administrasi keuangan nagari, menerima, menghimpun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mengumpulkan bahan untuk penyusunan Rancangan APB Nagari serta melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya. Fungsi Kepala Urusan Keuangan dan Aset adalah :

- a. Pelaksanaan administrasi keuangan nagari.
- b. Pengumpulan bahan-bahan penyusunan rencana APB Nagari.
- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- d. Pengelolaan keuangan nagari.
- e. Penerimaan dan penyaluran bantuan keuangan dari pemerintah daerah.
- f. Penyusunan rencana penggunaan uang.
- g. Pelaksanaan penataan administrasi keuangan nagari.

- **Wali Jorong**

Wali Jorong mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah kerjanya. Untuk menjalankan tugas tersebut Wali Jorong mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- b. Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban.
- d. Pengayoman dan pembinaan adat istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.

#### **4.2.1.3 Visi dan Misi Nagari Manggopoh**

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka visi dan misi dirumuskan kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Visi dan misi merupakan dasar bagi penentuan kebijaksanaan dan tindakan strategis.

##### **1. Visi**

Visi merupakan cara pandang ke depan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi tersebut

diarahkan serta bagaimana Nagari Manggopoh berkarya agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Selain itu visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Adapun visi Nagari Manggopoh adalah " NAGARI MAJU, BERADAT DAN MADANI ".

Nagari Maju, mengandung arti dalam bernagari harus mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik, kreatif dan semangat berusaha yang tinggi, serta berupaya meminimalkan pengangguran, sehingga Nagari Manggopoh dapat disejajarkan dengan nagari lain yang lebih maju.

Beradat, mengandung makna cerminan perilaku atau sikap " Tau Di Nan Ampek " yang harus dipegang teguh oleh setiap generasi Minangkabau dalam melaksanakan prinsip musyawarah/ mufakat dalam melahirkan suatu keputusan.

Madani, mengandung nilai-nilai kehidupan yang Madaniah sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang didasarkan kepada prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhuwah memupuk rasa " Cinto Banagari " dan pengakuan terhadap hak azasi setiap manusia.

## **2. Misi**

Misi merupakan kegiatan utama yang hendak dilakukan yang membuat organisasi memiliki jati diri yang jelas dan sekaligus membedakannya dari organisasi lain. Misi yaitu sesuatu yang harus

diemban atau dilaksanakan oleh Nagari Manggopoh sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan maka Nagari Manggopoh menetapkan misi sebagai berikut :

- a. menumbuh kembangkan sistem pemerintahan nagari yang baik dan bersih.
- b. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam prinsip-prinsip pemerataan pembangunan berbasis lingkungan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar kehidupan masyarakat.
- d. Mengembangkan sumber daya manusi.
- e. Meningkatkan pengamalan Norma Agama, adat dan sikap perilaku.

#### **4.2.2 Kondisi Kerja Perangkat Nagari Manggopoh**

##### **4.2.2.1 Tingkat Pendidikan Perangkat Nagari Manggopoh**

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya akan dicapai hasil yang optimal. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang memadai maka perlu pendidikan yang optimal. Oleh karena itu, tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu instansi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan hasil yang maksimal.

Tingkat pendidikan perangkat Nagari Manggopoh saat ini dapat dikatakan cukup memadai, karena secara umum perangkat Nagari Manggopoh rata-rata berpendidikan SLTA/ sederajat. Hal ini telah sesuai dengan pelaksanaan program pendidikan sembilan tahun (wajib belajar 9 tahun). Pendidikan yang memadai diharapkan dapat mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan, motivasi, etos kerja serta sikap yang dimiliki oleh masing-masing perangkat nagari dalam memahami tugas dan fungsinya.

Tingkat pendidikan perangkat Nagari Manggopoh dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut :

**TABEL 4.11**  
**TINGKAT PENDIDIKAN PERANGKAT NAGARI MANGGOPOH**  
**TAHUN 2008**

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Nedi Putra Mulya, SH	Wali Nagari	S.1
2.	Elfi Yora	Sekretaris Nagari	SLTA
3.	Afridawati	Bendahara Nagari	SLTA
4.	Nasrial	Kepala Urusan Pemerintahan	SLTA
5.	Sri Martini, SP	Kepala Urusan Aset Nagari	S.1
6.	Supratman	Kepala Urusan Pembangunan	SLTA
7.	Syamsuardi	Kepala Urusan Kesra	SLTA
8.	Martias	Wali Jorong Manggopoh Utara	SLTA
9.	Ali Mardani, S.Sos	Wali Jorong Kubu Anau	S.1
10.	Ali Safrin	Wali Jorong Anak Air Dadok	SLTA
11.	Masrizal	Wali Jorong Padang Tongga	SLTA
12.	El Yasin Syarif	Wali Jorong Sago	SLTA
13.	Jon Rizal	Wali Jorong Pasar Durian	SLTA
14.	Marda Suharto	Wali Jorong Batu Hampar	SLTA
15.	M. Nasir	Wali Jorong Balai Satu	SLTA
<b>JUMLAH</b>			<b>15</b>

*Sumber* : Profil Nagari Manggopoh, 2008

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan perangkat Nagari Manggopoh cukup memadai. Hal ini dibuktikan dengan hampir semua perangkat nagari berpendidikan SLTA/ sederajat, bahkan ada yang tingkat pendidikannya sarjana.

#### **4.2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Untuk memperlancar perangkat nagari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka harus didukung oleh sarana dan prasarana kerja yang memadai. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka akan sulit bagi perangkat nagari untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Dalam suatu organisasi, sarana dan prasarana merupakan faktor yang dominan dalam mengakomodasi dan mendukung segala kebutuhan organisasi tersebut. Sarana adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Sarana dan prasarana yang ideal sangat berpengaruh terhadap hasil kerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Karena sarana dan prasarana merupakan faktor yang vital dalam pencapaian program kerja Kantor Nagari Manggopoh.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Nagari Manggopoh dapat dilihat pada tabel 4.12. berikut :

**TABEL 4.12.**  
**SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DI KANTOR NAGARI**  
**MANGGOPOH TAHUN 2009**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (UNIT)
1.	Kantor	1
2.	Ruang Pertemuan	1
3.	Telepon	-
4.	Mesin Tik	1
5.	Komputer	2
6.	Printer	2
7.	Meja Kerja	10
8.	Kursi Kerja	18
9.	Kursi Tamu	1
10.	Lemari	4
11.	Papan Pengumuman	2
<b>JUMLAH</b>		<b>42</b>

*Sumber* : Kantor Nagari Manggopoh, 2009

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Kantor Nagari Manggopoh masih kurang. Dinilai masih kurang karena sarana prasarana yang ada belum cukup memadai dalam menunjang proses pelayanan. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja para perangkat Nagari Manggopoh.

#### **4.2.2.3 Jenis Pelayanan yang Diberikan Kepada Masyarakat**

Nagari merupakan organisasi pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pemberian pelayanan yang diberikan oleh perangkat nagari selama penulis melakukan kegiatan magang dan penelitian adalah sebagai berikut :

**TABEL 4.13.**  
**JENIS PELAYANAN DAN MASYARAKAT YANG MENERIMA**  
**PADA TANGGAL 3 JUNI 2009 SAMPAI 4 JULI 2009**

NO	JENIS PELAYANAN	MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN
1.	Kartu Keluarga	82 Orang
2.	Kartu Tanda Penduduk	178 Orang
3.	Surat Keterangan Nikah	24 Orang
4.	Surat Keterangan Pindah	11 Orang
5.	Surat Keterangan Usaha	18 Orang
6.	Surat Keterangan Kelahiran	6 Orang
7.	Surat Keterangan Lainnya	25 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>344 Orang</b>

*Sumber* : Kantor Nagari Manggopoh, 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang disediakan Nagari Manggopoh cukup baik. Terutama kebutuhan akan pembuatan KTP yang paling banyak yaitu 178 Orang.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Faktor-Faktor Yang Menghambat Kinerja Wali Nagari Dalam Meningkatkan Tertib Administrasi Nagari**

Dalam penyelenggaraan tertib administrasi nagari, banyak ditemukan hal-hal atau faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan administrasi dan mempunyai pengaruh yang besar bagi pelaksanaan administrasi nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Wali Nagari Manggopoh dan beberapa orang perangkatnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan tertib administrasi nagari adalah sebagai berikut :

#### **4.3.1.1 Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan Perangkat Nagari**

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap, mengenal dan mengembangkan metode berfikir secara sistematis agar dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya. Pendidikan pegawai sangat berpengaruh dalam penguasaan berbagai pekerjaan, terutama berkaitan dengan ketajaman pemikiran dan luasnya wawasan.

Pendidikan pegawai sangat penting untuk meningkatkan kepedulian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaan sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan landasan untuk membentuk, mempersiapkan, membina dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Pada dasarnya tingkat pendidikan seseorang dapat dipengaruhi oleh pendidikan formal yang diperoleh sebelum mencapai suatu pekerjaan dan menjadi persyaratan untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Selain pendidikan formal, seseorang juga memperoleh pendidikan nonformal dan informal. Jika pendidikan formal diperoleh melalui jenjang pendidikan dasar seperti SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi, maka pendidikan nonformal diperoleh melalui pendidikan diluar sekolah yang sifatnya tidak terlalu mengikat seperti pendidikan formal. Sedangkan

pendidikan informal biasanya diperoleh melalui pengalaman hidup baik secara sadar maupun secara tidak sadar baik itu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat.

Pengalaman kerja juga merupakan hal yang mempengaruhi kemampuan kerja perangkat nagari. Pengalaman kerja berkaitan dengan masa kerja yang telah dilewati, yaitu masa lamanya seseorang mengabdikan diri pada pekerjaan yang ditekuninya. Masa kerja yang lama akan membawa pengaruh terhadap pengalaman kerja yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula pemahaman terhadap kerja yang dihadapi atau dapat dikatakan semakin profesional di dalam bidangnya.

Keterbatasan pendidikan dan keterampilan perangkat nagari dapat dilihat dari ketidakmampuan sebagian besar perangkat nagari dalam memfasilitasi pekerjaan yang ada secara optimal terutama dalam hal administrasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nedi Putra Mulya, SH selaku Wali Nagari Manggopoh pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009, dikatakan bahwa tingkat pendidikan yang ada saat ini, belum menunjang pelaksanaan tertib administrasi. Selain itu, belum adanya sosialisasi langsung dari pemerintah kabupaten maupun kecamatan dalam memberikan latihan-latihan tentang pelaksanaan tertib administrasi kepada pemerintah nagari sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan perangkat nagari dalam pelaksanaan administrasi nagari.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Elfi Yora selaku Sekretaris Nagari Manggopoh pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009,

dikatakan bahwa tingkat pendidikan perangkat nagari yang rata-rata tamatan SLTA belum menjamin mereka untuk mengetahui sepenuhnya tentang ilmu pemerintahan apalagi tentang administrasi. Dalam pelaksanaan administrasi, secara keseluruhan masih sepenuhnya dipegang oleh Sekretaris Nagari. Pelaksanaan administrasi itu pun masih berpedoman pada buku petunjuk dan pelaksanaan administrasi yang telah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi di Nagari Manggopoh masih sangat rendah.

Hal ini diperkuat dengan tabel berikut :

**TABEL 4.14**  
**PELAKSANAAN BUKU ADMINISTRASI NAGARI/ BUKU REGISTER**  
**NAGARI DI NAGARI MANGGOPH TAHUN 2009**

NO	JENIS BUKU	ADA/ TIDAK	DIISI/ TIDAK	SESUAI DENGAN PERATURAN/ TIDAK
1.	Buku Administrasi Umum a. Buku Data Peraturan Nagari b. Buku Keputusan Wali Nagari c. Buku Inventaris Nagari d. Buku Aparat Pemerintah Nagari e. Buku Tanah Kas Milik Nagari f. Buku Tanah Nagari g. Buku Agenda h. Buku Ekspedisi	Tidak Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada	Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Diisi Diisi	- - Tidak Sesuai - Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai Sesuai
2.	Buku Administrasi Kependudukan a. Buku Data Induk Penduduk Nagari b. Buku Data Mutasi Penduduk c. Buku Data Rekapitulasi Penduduk d. Buku Data Penduduk Sementara	Ada Ada Tidak Ada	Diisi Diisi Tidak Tidak	Sesuai Sesuai - Tidak sesuai
3.	Buku Administrasi Keuangan Nagari a. Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari - Buku Anggaran Penerimaan - Buku Anggaran Pengeluaran	Ada Ada	Diisi Diisi	Sesuai Sesuai

	Rutin			
	- Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan	Tidak	Tidak	-
	b. Buku Kas Umum	Ada	Diisi	Sesuai
	c. Buku Kas Pembantu			
	- Buku Kas Pembantu Penerimaan	Tidak	Tidak	-
	- Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin	Tidak	Tidak	-
	- Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan	Tidak	Tidak	-
4.	Buku Administrasi Pembangunan			
	a. Buku Rencana Pembangunan	Tidak	Tidak	-
	b. Buku Kegiatan Pembangunan	Tidak	Tidak	-
	c. Buku Inventaris Pembangunan/ Proyek	Tidak	Tidak	-
	d. Buku Kader-Kader Pembangunan	Tidak	Tidak	-
5.	Buku Register lain yang di buat Nagari			
	a. Buku Register KTP	Ada	Diisi	Sesuai
	b. Buku Register KTP Sementara	Tidak	Tidak	-
	c. Buku Register SKKB/ SKCK	Ada	Diisi	Sesuai
	d. Buku Register Nikah	Ada	Diisi	Sesuai
	e. Buku Register Izin Hadjat	Tidak	Tidak	-
	f. Buku Register Akta Kelahiran	Ada	Diisi	Sesuai
	g. Buku Register Umum	Ada	Diisi	Sesuai
	h. Buku Register Riwayat Tanah	Tidak	Tidak	-
	i. Buku Register Kegiatan Wali Nagari	Ada	Diisi	Sesuai
	j. Buku Register Surat Pernyataan Wali Nagari	Tidak	Tidak	-

Sumber : Hasil Observasi, Juni 2009

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak buku-buku administrasi yang tidak digunakan oleh perangkat Nagari Manggopoh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perangkat nagari dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten untuk memperkenalkan ataupun memberikan pengarahan pada perangkat nagari secara langsung tentang penggunaan buku-buku administrasi tersebut.

#### **4.3.1.2 Keterbatasan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja Wali Nagari dalam meningkatkan tertib administrasi nagari. Sarana dan prasarana yang lengkap dan baik dapat menciptakan kondisi kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu serta dapat menjamin kelancaran pekerjaan bagi aparat.

Sarana dan prasarana Nagari Manggopoh secara umum sudah cukup memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan salah satu penunjang bagi usaha mewujudkan tertib administrasi nagari, karena dalam pekerjaan ketatausahaan saat ini semakin banyak pekerjaan yang harus dilakukan dengan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Sarana dan prasarana terdiri dari peralatan yang memudahkan pekerjaan yang merupakan faktor penunjang dalam rangka menciptakan administrasi pemerintahan yang tertib. Karena pengaruh dalam pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Untuk melaksanakan produktifitas pelayanan administrasi, kualitas pelayanan yang prima dan hasil yang memuaskan, yang mampu memberikan respon yang baik dari masyarakat, tentunya juga perlu didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif dan menjamin terpeliharanya peralatan-peralatan yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Afridawati selaku Bendahara Nagari pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2009, dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada masih belum cukup memadai. Karena banyaknya sarana dan prasarana yang belum ada dan rusak. Selain itu minimnya dana yang dimiliki oleh nagari juga mempengaruhi kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di nagari. Pernyataan ini didukung oleh data yang penulis peroleh dilapangan berikut :

**TABEL 4.15**  
**KONDISI SARANA DAN PRASARANA NAGARI MANGGOPOH**  
**TAHUN 2009**

NO.	JENIS PRASARANA	JUMLAH	KONDISI (BAIK/RUSAK)
1.	Kantor Desa	1	Baik
2.	Ruang Rapat	1	Baik
3.	Telepon	-	-
4.	Mesin Ketik	1	Baik
5.	Komputer	2	1 Rusak
6.	Printer	2	1 Rusak
7.	Meja Kerja	10	2 Rusak
8.	Kursi Kerja	18	4 Rusak
9.	Kursi Tamu	1	Baik
10.	Lemari Arsip	4	1 Rusak
11.	Papan Pengumuman	2	Baik
12.	Ruang Wali Nagari	1	Baik
13.	Ruang Sekretaris Nagari	-	-
14.	Ruang Staf	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>43</b>	

*Sumber* : Kantor Nagari Manggopoh, 2009

Dari hasil wawancara dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Nagari Manggopoh masih kurang memadai. Dinilai masih kurang karena sarana dan prasarana yang ada masih banyak yang rusak dan belum diperbaiki. Selain itu masih banyak juga sarana dan prasarana yang belum ada. Masalah lain yang

berkaitan dengan sarana dan prasarana adalah kurang memadainya fasilitas kantor yang tentunya menghambat pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Untuk menciptakan tertib administrasi yang optimal, dalam memberikan pelayanan yang memenuhi kualitas yang diharapkan, hendaknya pemerintah, menyiapkan berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan tersebut. Kelengkapan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan administrasi yang diberikan, sehingga keberadaannya perlu mendapatkan perhatian. Selain itu sarana dan prasarana dapat diukur dari jumlah peralatan yang memadai guna mendukung terselenggaranya pelayanan administrasi yang berkualitas, dan juga dengan adanya ruang yang nyaman serta peralatan lain yang mendukung pelayanan administrasi.

#### **4.3.1.3 Rendahnya Disiplin Kerja Perangkat Nagari**

Kesungguhan aparat dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat terutama konsisten waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara konseptual disiplin lebih merujuk pada sikap yang selalu taat pada aturan, norma, dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin juga berarti kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun.

Disiplin kerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang suatu kegiatan atau pekerjaan, dengan disiplin yang dimiliki

oleh setiap aparat akan menciptakan keadaan lingkungan kerja yang tertib dan teratur, sehingga apabila disiplin yang dimiliki baik maka akan menjangkakan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, namun apabila disiplinnya kurang maka sebaliknya akan menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Mengenai tingkat disiplin perangkat nagari, dapat dilihat dari kepatuhan aparat terhadap jam kerja yang berlaku, dimana jam kerja yang berlaku setiap harinya yaitu mulai pukul 07.30 sampai pukul 16.00 WIB, dengan lima hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Elfi Yora selaku Sekretaris Nagari pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, dikatakan bahwa disiplin perangkat nagari terhadap jam kerja memang masih kurang. Namun perangkat nagari dalam memberikan pelayanan selalu berusaha menyelesaikannya tepat waktu.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrial selaku Kepala Urusan Pemerintahan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, dikatakan bahwa tingkat disiplin perangkat nagari sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan administrasi yang dibutuhkan masyarakat sudah berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu.

Kemudian dari hasil pengamatan penulis terhadap disiplin kerja perangkat nagari menunjukkan bahwa kedisiplinan perangkat nagari dalam memberikan pelayanan masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari perilaku perangkat nagari yang tidak komitmen dengan waktu.

Kebanyakan perangkat nagari datang tidak tepat waktu sehingga proses pelayanan yang diberikan berjalan lambat.

Dari beberapa hasil wawancara dan pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan perangkat nagari masih sangat kurang. Terutama dalam kepatuhan terhadap jam kerja. Meskipun dalam hal jam kerja perangkat nagari banyak yang datang tidak tepat waktu, tetapi para perangkat nagari tetap datang pagi. Dan selama penulis penelitian dan magang, tidak pernah penulis melihat perangkat nagari yang datang siang ataupun tidak datang sama sekali kecuali berhalangan.

#### **4.3.1.4 Kurangnya Motivasi Kerja**

Pengertian motivasi berasal dari kata motif yang berarti dasar dorongan atau alasan seseorang dapat melakukan kegiatan apabila dalam dirinya terdapat kekuatan atau dorongan yang menggerakkan untuk melakukan kegiatan. Menurut Prayudi Admosudirjo dalam moekijat (2000:92) bahwa "Motivasi adalah segala macam tindakan yang perlu dilakukan untuk membuat orang-orang benar mau (ingin keras) untuk mencapai dan menyelesaikan segala apa yang menjadi kehendak dan rencana organisasi".

Motivasi yang ada dalam diri perangkat nagari berbeda-beda, tergantung dari keinginan perangkat tersebut untuk dalam menanggapi permasalahan dan mengambil tindakan dalam menghadapi suatu persoalan. Motivasi kerja perangkat nagari ditujukan pada suatu tindakan

atau sikap dalam bekerja untuk mencapai tujuan, untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan faktor dari luar ditunjukkan melalui sikap atasan terhadap bawahan.

Motivasi kerja merupakan sumber penggerak yang berasal dari luar diri perangkat nagari untuk melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, motivasi kerja ini sangat penting dan erat kaitannya dengan disiplin kerja.

Motivasi kerja akan mendorong seseorang untuk berupaya melakukan yang terbaik dalam setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepadanya, sehingga dapat menimbulkan prestasi kerja, hal ini dapat dikatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Namun dari prestasi kerja yang ditunjukkan, harus ada imbalan yang diberikan untuk memberikan motivasi kerja. Akan tetapi prestasi kerja tidak akan tercipta dengan berbekal motivasi kerja, masih ada faktor keterampilan, kemauan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap individu tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Martini, SP selaku Kepala Urusan Aset Nagari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009, dikatakan bahwa motivasi kerja perangkat nagari masih sangat rendah. Yang mempengaruhi tingkat motivasi perangkat nagari adalah kurangnya perhatian Wali Nagari terhadap bawahannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Elfi Yora selaku Sekretaris Nagari pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009, dikatakan

perangkat nagari untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan melanjutkan pendidikan, mengikuti kursus keterampilan, maupun mengikuti diklat perjenjangan baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya pemerintah dengan pertimbangan dana yang tersedia dan kesempatan yang diberikan oleh Wali Nagari.

#### **4.3.2.2 Penambahan Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang lengkap akan meningkatkan kondisi kerja yang baik. Yang dimaksud dengan kondisi kerja yang baik adalah menyangkut dari segi fisik dan lingkungan kerja, ruang kantor, dan fasilitas kerja yang memadai. Dengan kondisi kerja yang baik dapat mengurangi suasana cepat lelah dan menghilangkan rasa bosan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, mengenai sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kerja sudah cukup memadai, akan tetapi menyangkut usia dari keseluruhan sarana dan prasarana yang ada sebagian besar membutuhkan perbaikan atau bahkan penggantian.

Dalam pelaksanaan tertib administrasi sarana dan prasarana pendukung sangatlah penting demi kelancaran administrasi. Sarana ini antara lain komputer, telepon, meja tulis, kipas angin dan lemari arsip.

Pengadaan sarana dan prasarana khususnya ditekankan pada upaya pengadaan alat-alat administrasi yang mendukung pelayanan administrasi untuk masyarakat. Dari hasil wawancara dengan Bapak Nedi

Putra Mulya, SH selaku Wali Nagari Manggopoh pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan sarana dan prasarana adalah:

- a. Mengusulkan kepada pemerintah kabupaten melalui kecamatan untuk menambah sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini mengajukan proposal penambahan sarana computer dan sarana penunjang lainnya.
- b. Memanfaatkan sarana yang ada secara maksimal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
- c. Melakukan pemeliharaan sarana kerja secara berkesinambungan untuk menghindarkan kerusakan-kerusakan.

#### **4.3.2.3 Peningkatan Disipli Kerja Perangkat Nagari**

Kedisiplinan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas untuk mempercepat pencapaian tujuan yang diharapkan. Kedisiplinan menuntut kesanggupan untuk menghayati dan mentaati peraturan, norma-norma, hukum dan tata tertib yang berlaku sehingga secara sadar akan sanggup melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Di instansi pemerintah kedisiplinan bertujuan untuk membentuk dan menghasilkan perangkat nagari yang memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab yang tinggi. Ini semua bertujuan untuk meningkatkan

prestasi kerja perangkat pemerintah sehingga akan menghasilkan prestasi kerja yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Disiplin bertujuan untuk mengarahkan tingkah laku pada realisasi yang harmonis dari tujuan-tujuan yang diinginkan. Disamping itu adanya pandangan dari beberapa orang yang menyatakan bahwa disiplin kadang-kadang diartikan sebagai suatu yang negatif, yaitu mempunyai arti sebagai hukuman kepada pegawai yang gagal mencapai tujuan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk meningkatkan disiplin kerja perangkat nagari adalah dengan memberikan contoh/ teladan dalam penerapan disiplin kerja. Seorang pimpinan tidak mungkin memberikan arahan atau pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin kerja jika pimpinan itu sendiri tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nedi Putra Mulya, SH selaku Wali Nagari Manggopoh pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, diperoleh informasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin kerja perangkat nagari :

- a. Membudayakan rasa malu apabila melakukan kesalahan atau terlambat waktu dalam menyelesaikan tugas
- b. Membiasakan perangkat nagari dengan disiplin budaya kerja, budaya tertib dan bersih.

#### **4.3.2.4 Peningkatan Motivasi Kerja Perangkat Nagari**

Peningkatan motivasi kerja dalam sumber daya manusia erat kaitannya dengan pemberian penghargaan budaya nilai kerja dalam organisasi yang dapat mendorong prestasi kerja yang lebih tinggi dari pegawai. Peran organisasi untuk dapat mendorong pegawainya sebagai manusia individual sangat penting karena motivasi dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan sesuatu.

Seseorang mau bekerja biasanya karena ingin mencapai sesuatu dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi sebagai konsep manajemen telah banyak menarik perhatian para ahli. Hal ini dapat dimengerti mengingat betapa pentingnya motivasi dalam kepentingan organisasi. Disatu pihak motivasi memiliki peranan penting bagi setiap unsur pimpinan, sedangkan dipihak lain motivasi merupakan sesuatu hal yang dirasakan sulit oleh para pimpinan.

Motivasi memiliki peranan yang sangat penting bagi pemimpin unit organisasi yang dalam hal ini adalah Wali Nagari, karena keberhasilan Wali Nagari dalam menggerakkan orang lain, berhubungan erat dengan kemampuannya memberikan motivasi bagi perangkat nagari.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari hendaknya ada pemberdayaan terhadap sumber daya yang ada dalam kantor nagari yang sesuai dengan tugas/ pendelegasian yang diatur dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

Dengan jumlah perangkat nagari yang begitu minim, diharapkan agar semua tugas kantor nagari dapat terselesaikan dengan baik. Wali Nagari sebagai pimpinan tertinggi berusaha untuk melaksanakan tugas yang ada. Walaupun terkadang ada sedikit keterlambatan dalam penyelesaian administrasi nagari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nedi Putra Mulya, SH selaku Wali Nagari Manggopoh pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2009, usaha-usaha yang dilakukan Wali Nagari Manggopoh dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat nagari antara lain dengan meningkatkan semangat dan motivasi kerja perangkatnya dengan memberikan respon dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja perangkatnya.

Kemudian dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Elfi Yora selaku Sekretaris Nagari Manggopoh pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2009, dikatakan bahwa usaha yang dilakukan Wali Nagari dalam meningkatkan motivasi kerja perangkat nagari adalah dengan memberikan penghargaan, pujian, dan koreksi kepada perangkatnya. Meskipun Wali Nagari sering tidak masuk kantor, tetapi dalam hal memberikan motivasi Wali Nagari selalu berusaha agar para perangkatnya tetap bekerja dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kerespekan Wali Nagari terhadap perangkat nagari yang sakit atau terkena musibah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam meningkatkan motivasi kerja

perangkatnya sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semangat dan hasil kerja dari perangkat nagari. Hal lain yang penulis anggap penting dalam upaya Wali Nagari memotivasi bawahannya adalah dengan memperlakukan perangkat nagari sebagai rekan kerja dalam mencapai tujuan organisasi.